

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi keterlibatan WNI dengan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*. Upaya-upaya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yakni (1) Mengeluarkan upaya berupa kebijakan penegakan hukum dan undang-undang. (2) Upaya memaksimalkan program Deradikalisasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka acuan yang dipakai oleh penulis mengacu pada penelitian kualitatif yang menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada kualitas dengan analisis kualitatifnya sehingga didapat suatu hasil akhir yang benar dengan kesimpulan yang tepat dan Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang diambil dari buku-buku, literature, jurnal, surat kabar, majalah, serta dengan memanfaatkan data-data dari situs internet, dan lain-lain.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya mengeluarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui penegakan hukum dan undang-undang mengalami kendala disebabkan karena undang-undang yang dimiliki saat ini belum dapat menjerat WNI yang menyatakan dukungan terhadap ISIS. Selain itu, program deradikalisasi yang salah satunya melalui kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Republik Indonesia untuk memblokir situs-situs yang bermuatan isu mengenai ISIS menemui pro-kontra .

Diharapkan semua upaya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia nantinya dapat berhasil menekan dan mencegah persebaran paham radikalisme di Indonesia. Kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara namun dapat terus dipergunakan secara jangka panjang sebagai sebuah upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman.

